



Menteri Perhubungan RI

**SAMBUTAN MENTERI PERHUBUNGAN RI
PADA RAPAT KOORDINASI TEKNIS
(RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
SOLO, 26 s.d 28 JULI 2011**

Yang saya hormati:

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Solo;
3. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia yang saya hormati;
4. Para undangan sekalian yang berbahagia.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,***

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2011 dengan tema **"Membangun Komitmen Dan Kebersamaan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat"**. Tema ini mencerminkan sikap dan semangat kita untuk senantiasa cerdas dan tanggap dalam melakukan pembenahan, penyempurnaan, modernisasi pembangunan dan penyelenggaraan transportasi dalam mendukung pembangunan nasional.

Saya atas nama Pimpinan Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan Rakornis ini dengan baik. Rakornis ini merupakan ajang silaturahmi sesama insan perhubungan sekaligus bermanfaat untuk saling tukar pikiran, ide dan inovasi dalam menghadapi perkembangan, tantangan serta perubahan lingkungan strategis untuk dapat diantisipasi bersama.

Saya berharap Rakornis ini dapat menghasilkan keputusan yang strategis untuk memecahkan beberapa persoalan yang selama ini kita hadapi, baik pada tataran kebijakan maupun pada tataran operasional di lapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan transportasi darat.

Pada kesempatan ini saya menegaskan bahwa tema Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2011 mengedepankan semangat peningkatan pelayanan transportasi darat. Pelayanan jasa transportasi merupakan pelayanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pengguna transportasi darat. Sebagai realisasinya dapat kita tindaklanjuti dengan menyiapkan Standar Pelayanan Publik sebagai tolak ukur, acuan penilaian kualitas pelayanan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan adanya Standar Pelayanan Publik, maka jelas komitmen Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kinerja pelayanan khususnya transportasi darat.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung suatu paradigma baru yang harus disertai dengan perubahan pola pikir, penyamaan persepsi dan interpretasi aparatur perhubungan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu juga terdapat tantangan besar dan tugas-tugas penting yang akan kita hadapi, antara lain:

- a. Penyelenggaraan angkutan umum
Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum kepada masyarakat yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau;
- b. Penggunaan teknologi
Penggunaan peralatan GPS (*Global Positioning System*) dan *Electronic Smart Card* dalam penyelenggaraan sistem informasi angkutan umum, perizinan, dan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas
RTTMC, (*Road Transport & Traffic Management Center*), Pusat Pengendali Lalu Lintas / *ATCS*, *VMS (Variable Message Sign)*, Kamera CCTV;

- d. Optimalisasi kebijakan *zero overloading* bagi kendaraan angkutan barang
Melalui Program Akreditasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPKB)/Jembatan Timbang di seluruh wilayah Indonesia;
- e. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, isu strategis yang berkembang saat ini meliputi beberapa hal yaitu: komitmen tinggi dan kebersamaan yang kuat dalam upaya peningkatan kondisi sarana dan prasarana dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); peningkatan keselamatan transportasi darat; efisiensi dan diversifikasi penggunaan bahan bakar bidang transportasi; serta peningkatan pelayanan umum.

Selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan angkutan umum perlu dilakukan pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM). Prinsip penyelenggaraan angkutan umum massal "*Safe, Fastest, Cheap, Biggest*" dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penataan lalu lintas yang efisien sehingga dapat terwujud kondisi lalu lintas yang lancar dan terkendali.

Hal ini akan mengubah paradigma bahwa transportasi bukan hanya mengutamakan profit semata akan tetapi transportasi perkotaan merupakan pelayanan publik yang aman, nyaman, efektif dan efisien yang wajib disediakan oleh negara.

Kurang dari satu bulan lagi kita akan melaksanakan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dengan pembentukan Posko Terpadu Angkutan Lebaran tahun 2011/1432 H yang berlangsung dari H-7 hingga H+7.

Berdasarkan hasil evaluasi selama periode penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun lalu, dari H-7 sampai dengan H+7 terjadi 1.519 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 342 jiwa, korban luka berat sebanyak 461 orang dan luka ringan sebanyak 938 orang. Akibat kejadian tersebut kerugian materiil diperkirakan ± sebesar Rp. 6 Milyar.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan melalui berbagai momen penting diantaranya Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Pada 20 Juni 2011 telah diselenggarakan Pencanangan Dekade Aksi Keselamatan Jalan Nasional 2011-2020 oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan penyusunan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ). RUNK LLAJ ini perlu mendapat perhatian seluruh peserta Rakornis untuk dipersiapkan dan dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing.

Selanjutnya mengenai angkutan penyeberangan dapat saya sampaikan bahwa angkutan penyeberangan berperan sebagai sub sistem transportasi darat dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), mendukung pertumbuhan dan pelayanan sektor lainnya (*promoting and servicing sector*) serta berfungsi *multiplier effect* dan mendukung pembangunan daerah maupun pembangunan nasional secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pembangunan transportasi penyeberangan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan isu strategis, baik dari faktor kebutuhan (*demand*), ketersediaan anggaran, kelayakan fisik lingkungan, iklim investasi, faktor politis, dan lain sebagainya.

Pola pembangunan infrastruktur penyeberangan yang relatif murah, terintegrasi dengan jaringan jalan raya dan kereta api, pelayanan yang reguler dengan frekuensi yang tetap, upaya subsidi yang berkesinambungan dan menjangkau wilayah yang relatif terpencil menjadikan keunggulan ini dirasakan secara signifikan oleh masyarakat pengguna. Peran strategis ini perlu dipertahankan mengingat penyeberangan merupakan jembatan bergerak bagi moda transportasi darat lainnya.

Demikian beberapa pesan dan harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi perhatian dan bahan diskusi dalam Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2011. Semoga Saudara-Saudara senantiasa dikaruniai kesehatan, kesabaran dan kekuatan lahir batin sehingga dapat mencurahkan pemikiran sepenuhnya dalam mengikuti Rakornis ini.

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2011 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala upaya kita.

Sekian dan terima kasih.

***Wassalâmu'alaikum Warahmatullâhi
Wabarakâtuḥ dan Salam Sejahtera.***

**Jakarta, 26 Juli 2011
MENTERI PERHUBUNGAN**

FREDDY NUMBERI